



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

### SIARAN PERS

#### **BPK Banten Serahkan LHP LKPD Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Cilegon**

Serang, 31 Mei 2023 – BPK Provinsi Banten menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon Tahun 2022 kepada DPRD Kota Cilegon dan Pemerintah Kota Cilegon.

Penyerahan LHP atas LKPD Kota Cilegon Tahun 2022 dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Banten, Emmy Mutiarini kepada Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, H. Hasbi Sidik, S.T., M.Si. dan Walikota Cilegon, H. Helldy Agustian, S.E., S.H., M.H. di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (31/5).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Cilegon, kembali mendapatkan opini WTP. Pencapaian Opini WTP merupakan upaya dan hasil kerja dari seluruh pejabat dan pelaksana dari Pemerintah Kota Cilegon dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kota Cilegon, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Memadai; dan
2. Bukti Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Lima Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan.

Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP Dimana Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK per Semester II 2022, Pemerintah Kota Cilegon telah menindaklanjuti 953 rekomendasi dari 1.104 rekomendasi atau **86,32%** dari seluruh rekomendasi periode 2004–2022. Masih terdapat 148 rekomendasi (13,68%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam sambutannya Emmy Mutiarini menyampaikan agar Pimpinan DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, BPK berharap agar Pemerintah Kota Cilegon dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. “Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ungkap Emmy Mutiarini.